

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cetakan Pertama Edisi Kedua, Bandung: P.T Alumni, 2005.

Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung, 2011.

Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Firman Hasan, Najmi, dan Jean Elvardi, *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Internasional*, Padang, 2005.

F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2014.

I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung:

Yrama Widya, 2003.

J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*,

Bandung: PT. ALUMNI, 2015.

Mochtar Kusumaatmadja dan Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif*,

Cetakan Ketigabelas, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Romli Atmasasmita, *Hukum tentang Ekstradisi*, Jakarta: Fikahati Aneska,

2011.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas

Indonesia, 1986.

Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Surabaya:

Laksbang Justitia, 2009.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



B. Peraturan Perundang-undangan

Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia (*Extradition Treaty between The Republic of Indonesia and Australia*) 1992

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Ekstradisi Indonesia dengan Australia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Corrruption*.

C. Website

<http://www.interpol.go.id/id/berita/664-polri-dengan-kejagung-ri-meningkatkan-kerja-sama-dalam-rangka-penegakan-hukum-melalui-pemanfaatan-jaringan-interpol-i-247>,”Polri Dengan Kejagung RI Meningkatkan Kerja Sama Dalam Rangka Penegakan Hukum Melalui Pemanfaatan Jaringan INTERPOL I-24/7”,diakses pada tanggal 1 Mei 2016

www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/ekstradisi/definisi-prosedur-danimplementasi-ekstradisi/262-ekstradisi, “Ekstradisi”,diakses pada tanggal 24 Maret 2016

<https://kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=0&idsu=0&id=1135>, “The High Court Of Australia Menguatkan Penetapan Menteri Kehakiman Australia Untuk Menyerahkan Terpidana ANDRIAN KIKI KE INDONESIA”, diakses pada 26 April 2016

<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=10912>, “Buronan Kasus Korupsi BLBI Samadikun Hartono Dieksekusi Ke Rutan Salemba“, diakses pada tanggal 5 September 2016

<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsu=0&id=10912>,”Buronan Kasus Korupsi BLBI Samadikun Hartono Dieksekusi Ke Rutan Salemba”,diakses pada 26 April 2016

<https://www.ag.gov.au/Internationalrelations/Internationalcrimecooperationarrangements/Extradition/Documents/Factsheet/20Overview%20of%20the%20Extradition%20Process.pdf>, ”*Fact Sheet*” diakses pada 24/11/2016

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d2c80a0458f4/penyerahan-buron-andrian-kiki-terganjal--banding>, diakses pada 22/7/2016

